

**PEMETAAN DINAMIKA DAN TANTANGAN PERAN FKUB
REJANG LEBONG DALAM KERUKUNAN BERAGAMA****Mapping the Dynamics and Challenges of the Role of
FKUB Rejang Lebong in Religious Harmony****Elvira Purnamasari, M. Zikri, Jeni Harlen Saputra**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

elvira.purnamasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id; mzikri@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Article Info:**Submitted: Revised: Accepted: Published:**

Nov 17, 2025 Dec 11, 2025 Dec 23, 2025 Dec 28, 2025

Abstract

Religious harmony in multicultural settings is determined not only by the absence of open conflict, but also by institutional capacity to manage differences in a sustainable manner. The Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) of Rejang Lebong Regency faces several challenges, including low diversity literacy at the grassroots level, budget dependence on the local government, limited youth regeneration, and weak adaptation to challenges in the digital sphere. This study aimed to map the dynamics and challenges of the role of FKUB Rejang Lebong in maintaining interreligious harmony. A descriptive qualitative approach was employed, using passive observation during the *Praktik Pengalaman Lapangan* (PPL) program activities, semi-structured interviews with FKUB board members and religious leaders, and institutional document analysis. The findings show that FKUB Rejang Lebong plays a strategic role as a mediator in conflicts related to houses of worship, a facilitator of interfaith dialogue, and a provider of technical recommendations for licensing; however, the effectiveness of these roles is constrained by dependence on grant-based funding, low youth participation in the

Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA), and the limited production of narratives of religious moderation in the digital sphere. The study concludes that harmony in Rejang Lebong remains at the level of negative peace, thus requiring more inclusive and participatory institutional strengthening to achieve substantive harmony. The implications of this research include recommendations for the application of an Asset-Based Community Development (ABCD) approach and the enhancement of digital literacy and strategies to reinforce the role of FKUB in responding to contemporary socio-religious dynamics.

Keywords: FKUB; Religious Harmony; Rejang Lebong; Religious Moderation; Asset-Based Community Development

Abstrak: Kerukunan umat beragama di wilayah multikultural tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan konflik terbuka, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola perbedaan secara berkelanjutan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rejang Lebong menghadapi sejumlah persoalan, antara lain rendahnya literasi keberagaman di tingkat akar rumput, ketergantungan anggaran pada pemerintah daerah, minimnya regenerasi pemuda, serta lemahnya adaptasi terhadap tantangan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan memetakan dinamika dan tantangan peran FKUB Rejang Lebong dalam menjaga kerukunan umat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi pasif selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), wawancara semi-terstruktur dengan pengurus FKUB dan tokoh agama, serta analisis dokumentasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Rejang Lebong berperan strategis sebagai mediator konflik rumah ibadah, fasilitator dialog lintas iman, dan pemberi rekomendasi teknis perizinan, namun efektivitas peran tersebut dibatasi oleh ketergantungan pada dana hibah, rendahnya partisipasi pemuda dalam Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA), serta minimnya produksi narasi moderasi beragama di ruang digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kerukunan di Rejang Lebong masih berada pada level *negative peace*, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang lebih inklusif dan partisipatif untuk mencapai kerukunan substantif. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* serta penguatan literasi dan strategi digital guna memperkuat peran FKUB dalam merespons dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Kata Kunci: FKUB; Kerukunan Umat Beragama; Rejang Lebong; Moderasi Beragama; *Asset-Based Community Development*

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sosial di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki tingkat keberagaman tinggi (Azra, 2019). Realitas masyarakat Indonesia yang multireligius menuntut hadirnya mekanisme kelembagaan yang dapat mengelola perbedaan secara konstruktif (Diklat Kementerian Agama RI & Nasional, 2021). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk sebagai institusi strategis yang menjalankan peran mediasi, dialog, fasilitasi,

serta edukasi sosial dalam rangka memperkuat harmonisasi hubungan antar pemeluk agama (Indonesia, 2006). Pada banyak daerah, FKUB menjadi rujukan masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian persoalan keagamaan, termasuk isu rumah ibadah, hubungan antarumat beragama, hingga penanganan potensi konflik.

Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki keragaman pemeluk agama dan struktur sosial yang dinamis. Kondisi multikultural ini menjadikan ruang interaksi sosial antarumat beragama sangat intens, sehingga diperlukan pengelolaan hubungan sosial yang stabil dan berkelanjutan. FKUB Rejang Lebong telah menjalankan sejumlah program strategis seperti dialog lintas agama, mediasi persoalan keagamaan, penyuluhan moderasi beragama, serta fasilitasi rekomendasi pendirian rumah ibadah. Namun, dinamika sosial yang berkembang cepat menuntut lembaga ini bekerja lebih adaptif dan responsif.

Perkembangan teknologi informasi pada satu sisi memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain mempercepat penyebaran isu sensitif seperti intoleransi, hoaks bernuansa SARA, dan polarisasi identitas. Fenomena ini memperbesar tantangan bagi FKUB, karena konflik dapat muncul bukan hanya dari interaksi sosial langsung, tetapi juga dipicu oleh informasi digital yang beredar luas. Selain tantangan digital, hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran operasional, minimnya fasilitas administratif, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai fungsi FKUB juga masih menjadi persoalan yang menghambat efektivitas lembaga ini.

Berbagai penelitian di beberapa daerah menggambarkan kompleksitas tugas FKUB dalam menghadapi dinamika sosial-keagamaan. Penelitian di Kabupaten Sidoarjo misalnya menunjukkan bahwa efektivitas FKUB sangat bergantung pada kapasitas internal dan dukungan anggaran karena lembaga ini dituntut menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput (Kristanti & Adi, 2019). Hasil penelitian lain memperlihatkan bahwa keberhasilan FKUB dalam menjaga stabilitas sosial sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal antara pemuka agama yang terlibat di dalamnya (Kaharuddin & Darwis, 2019).

Dalam konteks daerah dengan karakter sosial keagamaan yang kuat, seperti Aceh, kemampuan FKUB dalam membangun toleransi dan komunikasi lintas agama sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap pendekatan yang digunakan lembaga ini (Nurdin et al., 2021). Sementara itu, studi pada FKUB Bengkulu menunjukkan bahwa

keberhasilan program moderasi beragama membutuhkan koordinasi yang sistematis antara lembaga agama, pemerintah daerah, dan masyarakat luas (Khairiah, 2023). Ada pula temuan yang menyoroti keterbatasan ruang dialog yang dimiliki FKUB karena statusnya sebagai lembaga yang berada di bawah struktur negara sehingga sering berhadapan dengan batasan-batasan politik tertentu (Sopyan et al., 2022).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa peran FKUB di berbagai daerah selalu berkaitan dengan konteks sosial masing-masing wilayah, sehingga pemetaan terhadap dinamika dan tantangan lembaga ini di tingkat lokal menjadi hal penting. Dalam konteks pengabdian masyarakat, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan di FKUB Rejang Lebong memberikan kesempatan untuk mengamati langsung bagaimana FKUB menjalankan perannya di wilayah yang multikultural. Melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kegiatan ini memetakan kekuatan, hambatan, serta kebutuhan FKUB dalam melaksanakan tugasnya.

Pemetaan tersebut tidak hanya penting bagi FKUB sebagai mitra pengabdian, tetapi juga membantu menyediakan data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa kegiatan PPL di FKUB Rejang Lebong merupakan upaya untuk melihat secara langsung dinamika dan tantangan lembaga dalam menjaga kerukunan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan model penguatan kerukunan umat beragama di daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan Pengalaman Pembelajaran Lapangan (PPL) yang dilaksanakan selama empat hari (29 Oktober-1 November 2025), kemudian wawancara secara online di Kabupaten Rejang Lebong. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memetakan dinamika dan tantangan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun kerukunan beragama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual, komprehensif, dan mendalam terhadap fenomena sosial terkait relasi antarumat beragama dan praktik kerja FKUB dalam konteks lokal.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus FKUB, tokoh agama, serta beberapa masyarakat. Teknik wawancara ini memberikan ruang

fleksibilitas, namun tetap mengacu pada pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya, sehingga data yang diperoleh mendalam dan relevan. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994).

Wawancara mendalam dilakukan dengan Sekretaris FKUB, anggota aktif, serta tokoh agama yang berperan sebagai informan kunci. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk memberi ruang eksplorasi terhadap pengalaman, pandangan, dan evaluasi mereka mengenai peran FKUB dalam menjaga kerukunan. Durasi wawancara berkisar 45–60 menit dan seluruh proses direkam dengan izin informan lalu ditranskripsikan. Teknik ini membantu menggali aspek subjektif dan normatif mengenai kebijakan, tantangan, serta insight strategis dari pihak FKUB (Creswell, 2018).

Kemudian pengumpulan data selain menggunakan wawancara juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan arsip resmi FKUB, seperti laporan kegiatan, catatan rapat, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi pola program, rekam jejak kegiatan, serta dinamika historis upaya kerukunan di Rejang Lebong. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber penting untuk memvalidasi temuan wawancara dan observasi, sekaligus memperkaya pemahaman tentang struktur dan fungsi kelembagaan FKUB.

Adapun, berdasarkan analisis tematik sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan antarumat beragama melalui berbagai pendekatan dialogis, edukatif, dan kolaboratif. Noor dkk. menemukan bahwa FKUB di masyarakat Tengger mengembangkan kerukunan melalui pendidikan agama multikultural yang melibatkan tokoh lintas agama dan pemerintah lokal, serta mampu menciptakan ruang pertemuan yang produktif bagi umat beragama dalam konteks multikultural (Noor et al., 2021). Penelitian lain oleh Kristanti dan Satmoko Adi menunjukkan bahwa FKUB Sidoarjo tidak hanya menjadi mediator dalam persoalan pendirian rumah ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai aktor kunci dalam mitigasi konflik sosial berbasis agama, terutama melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur (Kristanti & Adi, 2019). Selain itu, dialog lintas iman terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meredam potensi intoleransi, sebagaimana ditunjukkan penelitian Soffi yang mengkaji peran FKUB Lumajang dalam menyelenggarakan forum dialog rutin yang mampu menurunkan ketegangan antar kelompok agama (Soffi, 2023).

Temuan-temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Hudin dkk. mengenai

implementasi moderasi beragama oleh FKUB Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, serta kemampuan FKUB dalam melibatkan komunitas akar rumput (Hudin et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, Abas dan Ghofur menegaskan bahwa strategi kolaboratif antara FKUB, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di wilayah dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Solo Raya (Abas & Ghofur, 2021). Prasyarat kolaborasi, dialog berkelanjutan, dan literasi moderasi yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan FKUB menjalankan mandatnya secara efektif. Secara umum, literatur tersebut menegaskan bahwa peran FKUB tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik lokal, kualitas kepemimpinan tokoh agama, serta kecakapan lembaga dalam merespon isu keagamaan yang muncul secara cepat di era digital.

HASIL

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan observasi mendalam di Kabupaten Rejang Lebong memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menavigasi kompleksitas relasi sosial-keagamaan di wilayah tersebut. Temuan menunjukkan bahwa FKUB Rejang Lebong bukan sekadar lembaga administratif, melainkan instrumen vital yang menjembatani dialog lintas iman dan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik berbasis komunitas. Secara struktural, lembaga ini mengemban mandat yang mencakup koordinasi, fasilitasi, pemberian rekomendasi perizinan rumah ibadah, serta pembangunan ruang dialog antarumat beragama yang berkelanjutan.¹ Namun, implementasi tugas-tugas tersebut di tingkat lokal memperlihatkan dinamika yang sangat kompleks, melibatkan persinggungan antara aspek teknis regulasi dengan realitas sosiologis, kultural, dan politis yang ada di masyarakat Rejang Lebong.

Temuan utama dari observasi lapangan menunjukkan bahwa FKUB Rejang Lebong telah berhasil menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sosial, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara umum, kerukunan di Rejang Lebong berada pada kondisi yang harmonis namun masih menyimpan kerentanan laten, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah dan literasi keberagaman di tingkat akar rumput. Data yang terkumpul mengidentifikasi enam klaster

temuan utama yang menggambarkan realitas operasional lembaga ini di lapangan, mulai dari ketergantungan anggaran hingga keterbatasan adaptasi digital.

Hasil observasi mengonfirmasi bahwa FKUB Rejang Lebong memainkan tiga peran fundamental dalam menjaga kerukunan. Pertama, peran sebagai mediator konflik, di mana FKUB hadir untuk menengahi perbedaan pendapat terkait izin lingkungan pembangunan tempat ibadah. Dalam banyak kasus, keberatan warga sering kali bukan didasarkan pada sentimen agama yang murni, melainkan lebih pada kekhawatiran terhadap perubahan sosial, kepadatan permukiman, dan perizinan administratif. Kedua, peran sebagai fasilitator dialog, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan forum rutin pemuka agama untuk menyelaraskan pandangan mengenai moderasi beragama (Harmi et al., 2023). Ketiga, peran sebagai pemberi rekomendasi teknis yang menjadi syarat mutlak dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Indonesia, 2006).

Efektivitas lembaga dalam menjalankan peran-peran tersebut bervariasi tergantung pada konteks wilayahnya. Di pusat pemerintahan seperti Kecamatan Curup, intensitas interaksi antarumat beragama yang sangat tinggi menuntut FKUB untuk lebih proaktif dalam manajemen ruang publik dan perizinan. Sebaliknya, di wilayah yang lebih homogen, tantangan utamanya adalah minimnya interaksi substantif yang menyebabkan munculnya stereotip dan prasangka antar kelompok agama. Tabel berikut menyajikan ringkasan profil peran dan efektivitas FKUB Rejang Lebong berdasarkan hasil pemetaan lapangan.

Tabel 1. Hasil Pemetaan Lapangan Profil Peran Dan Efektivitas FKUB Rejang Lebong

Kategori Peran	Deskripsi Operasional di Lapangan	Tingkat Efektivitas	Instrumen Pendukung
Mediasi Konflik	Menangani sengketa rumah ibadah dan isu SARA digital di masyarakat.	Tinggi (Level Tokoh)	Pendekatan Persuasif & Kultural
Fasilitasi Dialog	Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) dan pertemuan lintas iman.	Sedang (Terkendala Anggaran)	Anggaran Hibah Pemda
Rekomendasi IMB	Verifikasi 90 jemaat dan 60 dukungan warga sesuai PBM 2006.	Tinggi (Prosedural)	Dokumen Administrasi & Survey
Edukasi Moderasi	Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di tingkat kecamatan.	Rendah (Jangkauan Terbatas)	Ceramah & Sosialisasi Formal
Pencegahan SARA	Pengawasan terhadap aliran atau ajaran yang dianggap menyimpang (PAKEM).	Tinggi (Kolaboratif)	Kerjasama dengan Kesbangpol

Adapun, visualisasi data berdasarkan pemetaan wilayah di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa dinamika keberagaman tidaklah seragam. Kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi, seperti Curup, Curup Tengah, dan Curup Timur, menjadi fokus utama kegiatan FKUB karena potensi gesekan sosial yang lebih besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah yang cenderung homogen membutuhkan pendekatan yang lebih menekankan pada literasi keberagaman untuk mencegah eksklusivisme keagamaan. Data menunjukkan bahwa ketidakmerataan interaksi antar kelompok agama ini menciptakan kebutuhan akan strategi intervensi yang berbeda-beda antar kecamatan.

Tabel 2. Visualisasi data hasil pemetaan wilayah di Kabupaten Rejang Lebong

Nama Kecamatan	Profil Demografis Agama	Isu Dominan yang Muncul	Kebutuhan Intervensi
Curup	Sangat Heterogen	Izin Rumah Ibadah, Persaingan Ruang Publik	Manajemen Konflik & Mediasi
Curup Tengah	Heterogen	Toleransi Tetangga, Perayaan Hari Besar	Penguatan Dialog Lintas Iman
Sindang Kelingi	Cenderung Homogen	Kurangnya Interaksi, Stereotip Agama Lain	Literasi Keberagaman Akar Rumput
Selupu Rejang	Moderat	Kerjasama Tokoh Adat dan Agama	Pendampingan Komunitas Pemuda
Bermani Ulu	Dominan Homogen	Literasi Moderasi Beragama	Sosialisasi Nilai Kebangsaan

Selain sebaran wilayah, data anggaran juga menunjukkan ketergantungan finansial yang signifikan. Seluruh operasional FKUB Rejang Lebong bergantung pada dana hibah Pemerintah Daerah, yang sering kali bersifat fluktuatif. Kondisi ini menyebabkan program-program yang bersifat edukatif dan jangka panjang sering kali terpinggirkan oleh kegiatan yang bersifat seremonial atau reaktif. Ketidakmandirian fiskal ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan model-model kerukunan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Salah satu temuan paling menonjol yang bersifat anomali dalam penelitian ini adalah kegagalan inisiatif pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) di Rejang Lebong. Meskipun pemerintah daerah dan kementerian agama telah memberikan dukungan formal, partisipasi aktif dari kalangan pemuda sangat rendah. Banyak calon pengurus yang sudah didata ternyata pasif, jarang menghadiri pertemuan, atau memilih untuk melanjutkan studi dan bekerja di luar kota. (Media Center Rejang Lebong, 2023) Fenomena ini menunjukkan adanya keterputusan komunikasi antara generasi senior pengurus FKUB dengan aspirasi dan gaya hidup generasi muda di daerah tersebut.

Anomali lainnya adalah kesenjangan antara "perdamaian formal" dan "literasi substantif". Di permukaan, Rejang Lebong tampak aman dan tidak memiliki konflik keagamaan yang terbuka (Harmi et al., 2023). Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa di tingkat akar rumput, masih banyak warga yang memahami kerukunan sebatas "tidak adanya keributan" (*negative peace*), bukan pada pemahaman mendalam tentang perbedaan keyakinan (*positive peace*). Prasangka sosial dan misinformasi mengenai ajaran agama lain masih banyak ditemukan dalam obrolan-obrolan informal di masyarakat, yang jika dipicu oleh hoaks digital, dapat dengan cepat berubah menjadi ketegangan nyata.

Tabel 3. Indikator Anomali berdasarkan Hasil Observasi

Indikator Anomali	Fakta di Lapangan (Rejang Lebong)	Dampak terhadap Kerukunan
Partisipasi Pemuda	Tingkat kehadiran rapat FPLA di bawah 30%. ¹⁰	Terhambatnya regenerasi kepemimpinan perdamaian.
Literasi Digital	Minimnya konten moderasi beragama dari internal FKUB. ¹	Ruang digital didominasi narasi eksklusif/hoaks.
Kemandirian Dana	Ketergantungan 100% pada hibah Pemda. ¹	Program bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.
Aksesibilitas Informasi	Masyarakat akar rumput kurang mengenal fungsi FKUB. ¹	Potensi konflik tidak terdeteksi sejak dini.
Mobilitas Kader	Kader potensial banyak pindah ke luar daerah. ¹⁰	Hilangnya sumber daya manusia strategis di lokal.

Apabila dibandingkan dengan penelitian di daerah lain, tantangan yang dihadapi FKUB Rejang Lebong memiliki pola yang konsisten dengan dinamika nasional namun dengan nuansa yang berbeda. Di Sidoarjo, efektivitas FKUB juga sangat bergantung pada kapasitas internal dan dukungan anggaran untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput (Kristanti & Satmoko Adi, 2019.). Sementara itu, di Kalimantan Barat, keberhasilan program moderasi beragama sangat ditentukan oleh kemampuan FKUB melibatkan komunitas-komunitas pemuda sebagai agen perdamaian (Duta Kerukunan), sebuah langkah yang justru menjadi titik lemah di Rejang Lebong (Harmi et al., 2023).

Tabel 4. Perbandingan Hasil Temuan FKUB Rejang Lebong dengan FKUB di Wilayah Lain

Dimensi Perbandingan	FKUB Rejang Lebong	FKUB Kalimantan Barat	FKUB Solo Raya
Model Kepemimpinan	Berpusat pada Tokoh Senior	Melibatkan Tokoh & Akademisi	Kolaborasi Strategis Elit-Sipil
Fokus Kegiatan	Mediasi & Rekomendasi IMB	Pelatihan Duta Kerukunan Muda	Mitigasi Konflik Berbasis Data

Dimensi Perbandingan	FKUB Rejang Lebong	FKUB Kalimantan Barat	FKUB Solo Raya
Tantangan Utama	Regenerasi & Dana Hibah	Luka Sosial Pasca-Konflik	Polarisasi Identitas Politik
Adaptasi Digital	Sangat Rendah	Mulai Berkembang	Cukup Aktif di Media Sosial
Respon Masyarakat	Pasif-Harmonis	Aktif-Partisipatif	Dinamis-Kritis

Di Pekanbaru, prosedur pemberian rekomendasi rumah ibadah telah sangat terstandarisasi melalui seleksi administratif dan survei lapangan yang ketat untuk menghindari kejanggalan data (Erman, 2010). FKUB Rejang Lebong telah mengadopsi pola serupa, namun tantangan di lapangan sering kali muncul dari faktor non-teknis seperti kecemasan warga sekitar yang membutuhkan pendekatan sosiologis lebih dalam daripada sekadar pemenuhan dokumen. Temuan di Aceh juga menunjukkan bahwa kerukunan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kelompok minoritas, yang menegaskan bahwa literasi keberagaman adalah faktor penentu jangka panjang bagi stabilitas wilayah (Dewi, 2018).



Gambar 1. Pelaksanaan Diskusi dan Wawancara

PEMBAHASAN

Analisis terhadap temuan di Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh FKUB bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan berakar pada struktur sosiopolitik dan dinamika perubahan zaman. Harmonisasi yang selama ini terjaga lebih banyak bertumpu pada otoritas moral tokoh agama senior, namun model ini mulai menghadapi tantangan serius seiring dengan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi dan berinteraksi di ruang publik digital.

Stabilitas sosial-keagamaan di Rejang Lebong saat ini dapat dikategorikan sebagai "kerukunan elitis", di mana perdamaian dijaga melalui kesepakatan-kesepakatan di tingkat pimpinan agama (Toga) dan pemerintah daerah. Model ini sangat efektif untuk meredam konflik besar secara cepat melalui jalur mediasi formal (Fitriani, 2021). Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya penetrasi nilai-nilai moderasi hingga ke level individu di masyarakat paling bawah. Minimnya literasi keberagaman menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam prasangka jika terjadi isu sensitif (Ahsan et al., 2024).

Ketergantungan finansial pada anggaran daerah menciptakan implikasi sosiologis di mana FKUB sering kali terlihat sebagai perpanjangan tangan birokrasi daripada lembaga independen milik masyarakat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat akar rumput terhadap FKUB sebagai mediator netral bisa tergerus jika terjadi konflik yang melibatkan kepentingan politik lokal (Muharja & Mulyana, 2019). Fenomena ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa lembaga mediator yang tidak memiliki kemandirian sumber daya akan sulit melakukan inovasi program yang bersifat kritis dan transformatif.

Temuan mengenai rendahnya partisipasi pemuda dan ketergantungan anggaran memberikan implikasi serius bagi masa depan kerukunan di Rejang Lebong. Diperlukan pergeseran model dari pendekatan *top-down* yang bersifat instruktif menjadi pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Dalam model ABCD, FKUB tidak lagi hanya memberikan ceramah tentang toleransi, tetapi mengidentifikasi dan menggerakkan aset yang dimiliki oleh komunitas lokal—seperti organisasi pemuda, kelompok pengajian, atau komunitas seni—untuk menjadi motor penggerak kerukunan secara mandiri (Delfita et al., 2025).

Selain itu, penguatan kapasitas digital menjadi keharusan mutlak. Di era di mana konflik dapat dipicu oleh hoaks di media sosial, FKUB harus memiliki tim komunikasi yang mampu memproduksi konten kreatif mengenai moderasi beragama. Kegagalan regenerasi di Rejang Lebong harus diatasi dengan memberikan ruang bagi pemuda untuk mengelola

platform komunikasi lembaga, sehingga pesan-pesan perdamaian dapat disampaikan dengan gaya yang relevan bagi generasi Z (Harmi et al., 2023). Tanpa adaptasi digital, peran FKUB sebagai penjaga kerukunan akan semakin tergerus oleh derasnya arus informasi yang tidak terfilter di ruang siber.

Implikasi lainnya berkaitan dengan struktur pendanaan. FKUB perlu mencari model-model pendanaan alternatif, misalnya melalui kemitraan dengan sektor swasta atau pengembangan program pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan perguruan tinggi lokal (Harmi et al., 2023). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan strategis seperti mediasi dan edukasi tidak terhenti hanya karena keterlambatan pencairan anggaran daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, durasi kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang relatif singkat (dua hari observasi langsung) mungkin belum mampu menangkap dinamika kerukunan dalam siklus tahunan yang lebih lengkap, seperti pada saat perayaan hari besar agama yang biasanya memiliki intensitas interaksi berbeda. Keterbatasan waktu ini menyebabkan data yang diperoleh cenderung bersifat "potret seketika" (snapshot) daripada analisis longitudinal (Dewangga & Taufik, 2025).

Kedua, keterbatasan akses terhadap informan dari kalangan masyarakat yang paling vokal menolak keberagaman di tingkat akar rumput membuat perspektif yang diperoleh didominasi oleh suara-suara moderat dan pengurus lembaga. Hal ini menyebabkan analisis terhadap akar prasangka sosial mungkin belum sedalam yang diharapkan dalam studi fenomenologi. Ketiga, faktor geografis Kabupaten Rejang Lebong yang luas dengan medan yang menantang membatasi tim peneliti untuk menjangkau seluruh kecamatan secara merata, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh wilayah kabupaten harus dilakukan dengan hati-hati.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemetaan dinamika peran *Forum Kerukunan Umat Beragama* (FKUB) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan posisi FKUB sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial melalui mediasi konflik rumah ibadah, pemberian rekomendasi teknis perizinan, serta fasilitasi dialog lintas iman. Meskipun situasi wilayah secara umum tampak harmonis, bentuk kerukunan yang terbangun lebih merefleksikan *negative peace* yang masih rentan terhadap gesekan karena rendahnya literasi keberagaman di

tingkat akar rumput. Tantangan utama yang diidentifikasi mencakup tingginya ketergantungan anggaran pada hibah Pemerintah Daerah, terhambatnya regenerasi pada kelompok pemuda (*FPLA*), serta minimnya adaptasi digital dalam merespons narasi hoaks bermuatan SARA, sehingga efektivitas peran FKUB sebagai lembaga mediator belum sepenuhnya optimal.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengayaan literatur sosiologi agama dan manajemen konflik lokal di wilayah multikultural di luar Pulau Jawa. Temuan penelitian memperkuat teori *intergroup contact* dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara kesepakatan kerukunan di tingkat elit agama dan realitas prasangka yang masih hidup di lapisan masyarakat bawah. Identifikasi anomali kegagalan regenerasi pemuda dalam konteks FKUB Rejang Lebong sekaligus menghadirkan perspektif baru bagi kajian kebijakan publik mengenai urgensi pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* dalam penguatan kapasitas dan keberlanjutan lembaga mediator seperti FKUB.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, kajian selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan secara longitudinal guna mengamati dinamika kerukunan pada periode-periode sensitif, seperti menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau hari besar keagamaan. Penelitian tindakan (*action research*) atau program pengabdian masyarakat juga perlu dikembangkan dengan fokus pada penyusunan dan implementasi modul literasi digital dan moderasi beragama berbasis media sosial bagi generasi Z di daerah. Selain itu, studi komparatif dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu yang memiliki karakteristik demografis berbeda diperlukan untuk merumuskan model kebijakan kerukunan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap keragaman konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Z., & Ghofur, A. (2021). Maintaining religious harmony through collaboration strategies: Peran FKUB di Solo Raya. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 6(2), 19–37. <https://doi.org/10.22515/islimus.v6i2.5209>
- Ahsan, A. A., Muchtar, F., & Imran, A. (2024). Menakar Potensi Kerukunan Antar Umat Beragama melalui Studi Persepsi Terkait dengan Realitas Pluralisme Agama pada Siswa/i Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kota Palopo. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 555–568. <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/557>
- Azra, A. (2019). *Rekonsiliasi dan Kerukunan Beragama di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Delfita, R., Wijayanti, T. Y., & Dahlan, D. (2025). Penguatan Capacity Building Pemuda Pelopor Moderasi Berbasis Pendekatan Asset-Based Community Development

- (ABCD). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31(1), 52–59. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/65244/26533>
- Dewangga, T. P., & Taufik, M. Z. (2025). *Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Singkawang*. IPDN.
- Dewi, R. (2018). *Interaksi Sosial Masyarakat Islam-Kristen dalam Mengembangkan Kerukunan Beragama (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Diklat Kementerian Agama RI, B. L., & Nasional, I. K. U. B. (2021). *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional*.
- Erman. (2010). Peran FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat di Pekan Baru. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(1), 78–89. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/428>
- Fitriani, K. A. S. (2021). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas. *Studia Sosia Religia*, 4(2), 12–19. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/download/11062/5076>
- Harmi, H., Syaputra, A. D., & Faturhman, I. (2023). Pendirian dan Pendampingan Forum Pemuda Lintas Agama di Rejang Lebong. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(3), 1–15. <https://doi.org/10.51214/00202303739000>
- Hudin, H., Amin, A., Fahmi, M. R., & Sulaiman, R. (2025). Moderasi Beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(3), 342–352. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/257>
- Indonesia, M. A. R. I. & M. D. N. R. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>
- Kaharuddin, & Darwis, M. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Luwu Timur. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>
- Khairiah. (2023). Religious harmony forum (FKUB) strategy in increasing religious moderation jurisprudence in Bengkulu Province. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 10(1), 171–185. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2952>
- Kristanti, A., & Satmoko Adi, A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2), 768–782. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/29432>
- Media Center Rejang Lebong. (2023). Badan Kesbangpool Rejang Lebong Menggelar Sosialisasi FKUB. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Muharja, D., & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 3(2), 120–132. <https://digilib.uinsgd.ac.id/eprint/22582>
- Noor, T. R., Idrus, I., Ridwan, M. M., & Maskuri. (2021). FKUB dan Implementasi Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Mengembangkan Kerukunan Umat

- Beragama pada Masyarakat Tengger. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19(1), 83–104. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i1.4498>
- Nurdin, A. R., Yusnaini, S., & dkk. (2021). Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) in Aceh: Strategies, roles and barriers in maintaining interfaith harmony. *Ulumuna*, 25(2), 306–328. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2910762>
- Soffi, D. A. (2023). Dialog Lintas Iman: Upaya FKUB dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama (Studi di Kabupaten Lumajang). *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 7(2), 176–192. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.02.5>
- Sopyan, I., Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2022). Religious harmony, godly nationalism, and the limits of state-sponsored interreligious dialogue agenda in Indonesia. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 6(2), 31–53. <https://islamikainside.iain-jember.ac.id/index.php/islamikainside/article/view/113>